

## Penyerapan Dana Alokasi Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Selatan Masih Rendah



Sumber gambar:

[https://lh3.googleusercontent.com/Eyi4sV6kGjc/ZAlada2IZRI/AAAAAAAAAk0/DqBWgXxYmLU535Wx5\\_WD0oVPmV9XeCE\\_ACNcBGAsYHO/s1600/1678334577256372-0.png](https://lh3.googleusercontent.com/Eyi4sV6kGjc/ZAlada2IZRI/AAAAAAAAAk0/DqBWgXxYmLU535Wx5_WD0oVPmV9XeCE_ACNcBGAsYHO/s1600/1678334577256372-0.png)

Angka penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan kekerasan dan perlindungan anak dan perempuan di Kalsel masih rendah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel, Adi Santoso mengemukakan sudah membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di 13 kabupaten/kota di Kalsel yang didukung DAK APBN melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). “Namun sangat disayangkan dari 13 kabupaten/kota penyerapannya rendah di bawah 40 persen,” ujarnya, Rabu (8/3/2023).

Adi menyampaikan rendahnya serapan ini kemungkinan alasannya akibat kekhawatiran pemeriksaan atau tidak sesuai aturan penggunaan dana DAK. Adapun terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan kata ia karena kesadaran masyarakat dan keberanian untuk melaporkan ketika mendapat tindakan kekerasan bukan hanya seksual namun juga psikis seperti bullying masih rendah.

“Padahal sesuai peraturan perundang-undangan sudah ada perlindungan saksi dan korban,” jelasnya. Pihaknya pun lanjutnya terus melakukan sosialisasi yang massif dengan Call Centre 129. “Jadi korban kekerasan saat ini mudah untuk melaporkan dan akan diterima oleh sistem yang bekerja selama 24 jam,” ucapnya. Berdasarkan data tahun 2022 kasus kekerasan pada anak dan perempuan DP3A Kalsel, daerah tertinggi terdapat pada

Kota Banjarmasin dengan 194 kasus rinciannya 49 anak laki-laki, 76 anak perempuan dan 69 orang dewasa.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan, tiga Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin. Itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Mahani Harahap dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit, penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan. “BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap dalam siaran persnya, Selasa (5/7).

Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik. “Secepatnya sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu. Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik. “Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tukasnya.

## Sumber Berita

1. <https://www.beritabanjarmasin.com/2023/03/penyerapan-dak-perlindungan-perempuan.html>, Penyerapan DAK Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kalsel Masih Rendah (09/03/23)
2. <https://www.gatra.com/news-547415-kalimantan-waduh-realisis-penyaluran-dak-fisik-di-wilayah-kalsel-sangat-rendah.html>, Waduh! Realisasi Penyaluran DAK Fisik di Wilayah Kalsel Sangat Rendah (06/07/22)

## Catatan:

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

### Pasal 2

#### Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

#### Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;

- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.